

# Laporan

## PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA  
(PERSERODA)



LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BATURAJA (PERSERODA)  
TAHUN 2023



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.0828 RT 034 RW 010 Kel.Baturaja  
Lama Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi  
Sumatera Selatan  
TELEPON: 0735 3740229

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penerapan tata kelola BPR Baturaja harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Prinsip tata kelola harus dijalankan dan menjadi pedoman BPR Baturaja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sangat tercermin dari kondisi BPR Baturaja baik dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, pelaksanaan operasional yang hati-hati, kegiatan bisnis yang berorientasi pada risiko dan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. BPR Baturaja sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis kepercayaan tentu memiliki standar dan mekanisme dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan dapat menjaga kepercayaan yang “dikelolanya” tersebut. Kepercayaan adalah aset paling berharga dari nasabah yang harus dijaga oleh BPR Baturaja karena kepercayaan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk BPR Baturaja dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berikut prinsip – prinsip penerapan tata kelola yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha:

1. Keterbukaan (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Bank dalam pelaksanaannya telah melakukan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan baik. Hal tersebut terwujud paling sedikit dalam hal :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana Bisnis Bank; dan
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Januar Hertanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 016/02/ BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, berikut tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li><li>(2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.</li><li>(3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>(4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li><li>(5) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (4) di atas adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li><li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li><li>c. Kantor Pajak; dan</li><li>d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li></ol> <p>Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Tanggal 23 Juni 2016 Nomor 174 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor</p>			

AHU-0031946,AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904.

2.	Nama	:	Fitriyadi Suhendra
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 016/02/BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, berikut tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:

- (1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- (2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- (5) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (4) di atas adalah:
  - a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;
  - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
  - c. Kantor Pajak; dan
  - d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Tanggal 23 Juni 2016 Nomor 174 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946,AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris diantaranya tindak lanjut hasil temuan audit baik hasil audit yang dilakukan oleh:

1. Audit Internal;
2. Kantor Akuntan Publik; dan
3. Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu Direksi telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi pelaporan seperti:

1. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
2. Laporan Tahunan, Laporan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko;
3. Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
5. Laporan Sipesat, Laporan DTTOT, Laporan APU - PPT, Laporan Pengkinian Data Nasabah;
6. Laporan SLIK, Laporan Restrukturisasi Kredit;
7. Laporan Publikasi Keuangan; dan
8. Laporan lainnya sesuai perundang-undangan.

Direksi juga telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pengesahan kebijakan dan kegiatan BPR Baturaja, diantaranya:

1. Tanggal 6 Maret 2023 Pengesahan Penyesuaian RBB TA 2023.
2. Tanggal 8 Maret 2023 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dekom.
3. Tanggal 10 Maret 2023 Pengesahan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022.
4. Tanggal 31 Maret 2023 Pengesahan Biaya Perjalanan Dinas Eksternal dan Biaya Perbamida.
5. Tanggal 25 Mei 2023 Pengesahan Biaya Sewa Tanah dan Bangunan untuk Perluasan Gedung Kantor.
6. Tanggal 30 Mei 2023 Pengesahan Biaya Sertifikasi Calon Anggota Dewan Komisaris an. Dharmawan Irianto.
7. Tanggal 27 Juni 2023 Pengesahan Perubahan Rencana Bisnis Bank TA 2023.
8. Tanggal 14 Juli 2023 Pengesahan Laporan Tugas Akhir Masa Jabatan Direksi
9. Tanggal 18 Juli 2023 Pengesahan Pengangkatan Kembali Direksi
10. Tanggal 16 Agustus 2023 Pengesahan RAB Perluasan dan Renovasi Gedung Kantor Pusat PT BPR Baturaja (Perseroda)
11. Tanggal 16 November 2023 Pengesahan Pembayaran Penggantian Uang Cuti Besar
12. Tanggal 29 November 2023 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 12 Tugas dan Wewenang Direksi
13. Tanggal 2 Desember 2023 Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024

Selama Tahun 2023 Direksi telah menyetujui beberapa kebijakan diantaranya:

1. SK Direksi tentang Perubahan Insentif Pegawai Bagian Kredit.

2. SK Direksi tentang Program BPR Baturaja Award.
3. SK Direksi tentang Struktur Organisasi PT BPR Baturaja (Perseroda).
4. SK Direksi tentang Job Description dan Job Specification.
5. SK Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional.
6. SK Direksi tentang Struktur dan Skala Upah.
7. SK Direksi tentang Pembentukan Panitia Sewa dan Renovasi Gedung Kantor Pusat PT BPR Baturaja (Perseroda).
8. SK Direksi tentang Program Undian Kredit Berhadiah.
9. SK Direksi tentang SOP Krida Sertifikasi Guru Kabupaten OKU Timur.
10. SK Direksi tentang Perubahan SOP Krida Sertifikasi Diknas dan Kemenag OKU Selatan
11. SK Direksi tentang Peningkatan dan Pembentukan Unit Literasi dan Inklusi Keuangan
12. SK Direksi tentang Pegawai Pengganti
13. SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Sindikasi
14. SK Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda)
15. SK Direksi tentang Perubahan Job Description dan Job Specification
16. SK Direksi tentang Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
17. SK Direksi tentang Perubahan Pertama tentang Penilaian Kinerja dan Pembayaran Tunjangan Kinerja
18. SK Direksi tentang Pembentukan Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
19. SK Direksi tentang Pedoman Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
20. SK Direksi tentang Kode Etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
21. SK Direksi tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen
22. SK Direksi tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Konsumen
23. SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM
24. SK Direksi tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Deposito
25. SK Direksi tentang Perubahan Pedoman Standar Teknologi Informasi PT BPR Baturaja Kabupaten OKU

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi juga telah menganggarkan biaya Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2023 dan telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk Pengurus dan Pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Rahma Delawati dan Candra Budi materi Sistem Pengawasan RBB.
2. Januar Hertanto dan Fitriyadi Suhendra materi Sosialisasi Penginputan LHKPN.
3. Feriyanto materi Penginputan Tingkat Kesehatan Bank.
4. Januar Hertanto, Feriyanto dan Dani Hariansyah materi Pelatihan Produk Simarmas - GO.
5. Januar Hertanto dan Rahma Delawati materi Training Light Up Your Spirit In 2023.
6. Sirwanto dan Debi Alpa Nugraha materi IT Service Management.
7. Januar Hertanto, Rahma Delawati dan Candra Budi materi Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana

Perbankan.

8. Veronika dan Verlian Oktafianti materi Perpajakan.
9. Januar Hertanto dan Rahma Delawati materi Seminar dan Rakernas Perbamida.
10. Seluruh Pegawai Bagian Kredit materi Manajemen Data dan Strategi Pemasaran Produk.
11. Januar Hertanto dan Heri Sulistio materi Skema dan Strategi Kredit Sindikasi.
12. M. Riki Yulandi dan Ken Yuda Isywara materi strategi penagihan Kredit/ Piutang Macet Secara Terintegritas serta aman dari jerat Hukum.
13. Januar Hertanto, Rahma Delawati dan Dharmawan Irianto materi ujian sertifikasi Direktur dan Komisaris.
14. Fitriyadi Suhendra, Candra Budi, Neli Sasmita dan Ahmad Fariz J materi Pelatihan Awareness ISO 27001 Part 3
15. Neli Sasmita, Oktari Azalea Putri, Melta Intan Purnama, Seluruh Pegawai Credit Administration, Oktajayanti, Phoeby Yelita dan Dio Pirnando materi Pelatihan Certified Internal Audit Professional Advance
16. Fitriyadi Suhendra, Veronika, M. Riki Yulandi, Neli Sasmita dan Verlian Oktafianti materi Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Badan & Koreksi Fiskal untuk BPR
17. Indri Pracita Ayunisi dan Febby Puspita Sari materi Pelatihan Implementasi Penerapan APU PPT di BPR/S mengacu pada POJK Nomor 8 Tahun 2023
18. Januar Hertanto materi Seminar Nasional dan Rakernas Perbarindo
19. Neli Sasmita materi Pelatihan Aplikasi SI- RAKB BPR (Sistem Informasi - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR)
20. Rahma Delawati materi Diklat Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah
21. Hendra Gunawan materi Training Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
22. Seluruh Pengurus dan Pegawai materi Outbound Team Bulding 2023 Tema Always Caring & Helpful
23. Hendra Gunawan materi Workshop Aplikasi Online SIP- APUPPT & PPPSPM dan Aplikasi Online SIPEKAP
24. Rahma Delawati dan Januar Hertanto materi Sosialisasi Pembahasan Program Kerja Tahun 2024
25. Fitriyadi Suhendra materi Kontribusi FGD Sosialisasi Pembahasan Program Kerja Tahun 2024
26. M. Riki Yulandi materi Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Angkatan XVII

Komposisi Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) tahun 2023 tidak mengalami perubahan namun Direksi diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Juli 2023 yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 10 Tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn yang pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0149558 Tanggal 08 Agustus 2023.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
-----	--



1.	Nama	:	Rahma Delawati
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 016/02/ BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan</li> <li>b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (6) di atas adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li> <li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li> <li>c. Kantor Pajak; dan</li> <li>d. Lembaga Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(8) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>(9) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>(10) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p>			

Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 174 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946,AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904.

2.	Nama	:	H. Achmad Tarmizi
	Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 016/02/ BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan</li> <li>b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (6) di atas adalah</p>			

- a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Kantor Pajak; dan
- d. Lembaga Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

(9) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

(10) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 174 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946,AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris berikut rekomendasi dari Dewan Komisaris Kepada Direksi selama Semester I Tahun 2023, yaitu:

1. Menindaklanjuti hasil rapat atas pemaparan pelaksanaan realisasi RBB tahun 2022 sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan RBB TA 2023 di Triwulan I dan akan dilakukan monitoring setiap progressnya sesuai dengan time line yang dibuat oleh Direksi.
3. Menindaklanjuti setiap temuan audit baik audit internal maupun audit eksternal.
4. Mengawasi dan memonitoring setiap pelaksanaan aturan internal.
5. Pembahasan Pelaksanaan RBB TA 2023 diantaranya secara berkesinambungan, diantaranya:
  - a. Perubahan Modal Dasar;
  - b. Pengelolaan Payroll PPPK;
  - c. Penyesuaian RBB TA 2023;
  - d. Tindak Lanjut Audit Pajak;
  - e. Tindak Lanjut Klaim Asuransi;
  - f. Tindak Lanjut Pergantian Core Banking System; dan
  - g. meningkatkan Volume Simpanan Pihak Ketiga khususnya Tabungan Simpanan Pelajar.
6. mempersiapkan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2023 - 2026.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama Semester I Tahun 2023 Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direksi diantaranya:

1. Direksi telah menindaklanjuti temua audit internal maupun eksternal sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Auditor.
2. Direksi telah melakukan pembahasan dan pengajuan Perubahan Modal Dasar dengan diajukannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Bagian Hukum Setda OKU untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya ke DPRD Kabupaten OKU.
3. Direksi telah memerintahkan Bagian MKA untuk melakukan review dan sosialisasi Peraturan Internal maupun Peraturan Eksternal kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan operasional BPR Baturaja.
4. Direksi bersama tim bisnis dan operasional telah melakukan kajian dan upaya untuk mengelola Payroll PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU diantaranya studi banding, rapat pembahasan dan menjajaki kerja sama ke berbagai pihak terkait fasilitas layanan jasa perbankan.
5. Direksi telah melakukan pembayaran kekurangan Pajak Badan sesuai dengan hasil perhitungan dari Kantor Pajak.
6. Klaim Asuransi yang masih banyak tertunggak telah dilakukan upaya oleh Tim Collection dan Pengurus dengan menyurati dan mendatangi secara langsung dalam rangka untuk memastikan proses pengajuan klaim asuransi oleh BPR Baturaja.
7. Direksi dan Bagian terkait telah melakukan proses pergantian Core Banking System dimulai dari tahapan persiapan data, pelatihan dan implementasi.
8. Direksi telah melakukan penambahan Pegawai khususnya pada Bagian Funding Officer dalam rangka meningkatkan dana Pihak Ketiga khususnya Tabungan Simpel.
9. Direksi telah mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka untuk melakukan proses pengangkatan anggota Direksi dan seleksi Anggota Dewan Komisaris.

Selama Semester II Tahun 2023 Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direksi diantaranya:

1. Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit internal maupun eksternal sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Auditor.
2. Direksi telah memerintahkan Bagian MKA untuk melakukan review dan sosialisasi Peraturan Internal maupun Peraturan Eksternal kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan operasional BPR Baturaja, diantaranya terkait dengan Perlindungan dan Pengaduan Konsumen dan APU, PPT dan PPPSPM
3. Perubahan Core Banking System ke PT Teradata Megah
4. Klaim Asuransi yang masih banyak tertunggak telah dilakukan upaya oleh Tim Collection dan Pengurus dengan menyurati dan mendatangi secara langsung dalam rangka untuk memastikan proses pengajuan klaim asuransi oleh BPR Baturaja.

5. Direksi telah melakukan langkah- langkah dalam rangka untuk melakukan proses pengangkatan anggota Direksi dan seleksi Anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) tahun 2023 mengalami perubahan dimana posisi Komisaris yang sebelumnya dijabat oleh H. Achmad Tarmizi sejak tanggal 19 Juli 2023 mengalami kekosongan karena berakhirnya masa jabatan. Pemberhentian H. Achmad Tarmizi selaku Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Juli 2023 yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 10 Tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn yang pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0149558 Tanggal 08 Agustus 2023.

Pemenuhan Kekosongan Anggota Dewan Komisaris masih dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Pemegang Saham Pengendali dan pada saat Laporan Tata Kelola ini disampaikan masih dalam proses persetujuan di Otoritas Jasa Keuangan.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Modal Inti yang dimiliki oleh BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dimaksud dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris karena modal inti yang dimiliki masih di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dimaksud dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris karena modal inti yang dimiliki masih di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Januar Hertanto	Rp0	0%
2.	Fitriyadi Suhendra	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Baturaja			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Januar Hertanto	-	-	0%
2.	Fitriyadi Suhendra	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Perusahaan Lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Januar Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriyadi Suhendra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Januar Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriyadi Suhendra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda hingga derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rahma Delawati	Rp0	0%
2.	H. Achmad Tarmizi	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Baturaja.			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rahma Delawati	-	-	0%
2.	H. Achmad Tarmizi	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rahma Delawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	H. Achmad Tarmizi	Tidak ada	Tidak ada	<p>Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu - H. Achmad Tarmizi adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU dengan jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Daerah dan terakhir sebagai Staf Ahli Bupati yang dipastikan menerima penghasilan dan bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten OKU selain itu H. Achmad Tarmizi adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dalam menentukan anggaran Pemerintah Kabupaten OKU</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Sebagian anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham namun Komisaris An. H. Achmad Tarmizi memiliki hubungan Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten OKU karena yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU dengan jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Daerah dan terakhir sebagai Staf Ahli Bupati yang dipastikan menerima penghasilan dan bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten OKU selain itu H. Achmad Tarmizi adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dalam menentukan anggaran Pemerintah Kabupaten OKU

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rahma Delawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	H. Achmad Tarmizi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda hingga derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp1.116.038.260	2	Rp464.089.055
2.	Tunjangan	2	Rp709.272.728	2	Rp144.000.000
3.	Tantiem	2	Rp73.372.692	2	Rp32.610.086
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp52.375.890	1	Rp6.285.107
Total			Rp1.951.059.570		Rp646.984.248

Penjelasan Lebih Lanjut :

Gaji, Tunjangan, Tantiem dan Dana Kesejahteraan yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;

1. Akta Notaris Nomor 85 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan
2. Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.
3. Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.

Sejak tanggal 19 Juli 2023 Komposisi Anggota Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) orang yang sebelumnya 2 (dua) orang. Komisaris an. Achmad Tarmizi diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2023 karena berakhir masa jabatan sehingga perhitungan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas lainnya untuk Komisaris tidak penuh 12 (dua belas) bulan.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Kendaraan Dinas (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2), Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth (2)	BPJS Kesehatan (2), Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Komunikasi (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Purna Jabatan (2), Fasilitas Bantuan Hukum (2)	Fasilitas Komunikasi (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Purna Jabatan (2), Fasilitas Bantuan Hukum (2)

Penjelasan Lebih Lanjut :

Fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;

1. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 85 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.;
2. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 27 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan
3. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 42 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.

Untuk Fasilitas Rumah Dinas Direksi bergabung dalam 1 (satu) unit Rumah yang sama, sedangkan untuk Fasilitas Purna Jabatan terakhir Direksi menerima bulan Juli 2023 sebelum pengangkatan kembali dilakukan setelah Pengangkatan Kembali dilakukan Direksi tidak menerima Fasilitas Purna Jabatan dimaksud. Fasilitas Purna Jabatan masih diberikan kepada Dewan Komisaris.

Sejak tanggal 19 Juli 2023 Komposisi Anggota Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) orang yang sebelumnya 2 (dua) orang. Komisaris an. Achmad Tarmizi diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2023 karena masa jabatan berakhir sehingga perhitungan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas lainnya untuk Komisaris tidak penuh selama 12 (dua belas) bulan.

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.45 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.53 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
<p>Perhitungan Rasio Gaji sebagaimana dimaksud sudah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Gaji atau penghasilan keseluruhan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 85 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.;</li> <li>2. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 27 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan</li> <li>3. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 42 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> </ol> <p>Sedangkan untuk Pegawai telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 005A/02/BPR.BTA/2023 Tentang Struktur dan Skala Upah.</p> <p>Gaji Komisaris an. H. Achmad Tarmizi terhitung mulai Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 karena Jabatan Komisaris berakhir pada tanggal 19 Juli 2023 sehingga total gaji yang diterima tidak utuh selama 12 (dua belas) bulan yang menyebabkan rasio cukup tinggi.</p>	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Januari 2023	2	1. Pembahasan dan Evaluasi Realisasi RBB Tahun 2022 2. Pembahasan dan Saran Langkah-Langkah Strategis Rencana Bisnis diantaranya a. Pengelolaan Payroll PPPK; b. Pembuatan Produk Simpanan; c. Perubahan Modal Dasar; d. Kerja Sama Channeling; dan e. Perubahan Core Banking System.
2.	03 April 2023	2	1. Pembahasan dan Evaluasi RBB Triwulan II 2. Pembahasan Langkah - Langkah Strategis a. Perubahan Modal Dasar; b. Masa Jabatan Pengurus; c. Pengelolaan Payroll PPPK; d. Penyesuaian RBB TA 2023; e. Pembahasan Laporan Direksi TW I Tahun 2023; f. Pembahasan Core Banking System; g. Pembahasan Temuan Pemeriksaan Pajak; h. Pembahasan Klaim Asuransi yang tertunda; i. Penanganan Kredit Bermasalah; j. Program Undian Kredit Berhadiah; k. Pembahasan penghimpunan Dana; dan l. Kerja Sama Channeling.
3.	03 Juli 2023	2	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan RBB tahun 2023 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan internal BPR Baturaja 3. Pembahasan pelaksanaan langkah strategis dan RBB Tahun 2023 a. Perubahan Modal Dasar b. Pelaksanaan RUPS Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Anggota Komisaris c. pengelolaan payroll PPPK Dinas Pendidikan d. Penyampaian atau RUPS Laporan Direksi Tugas Akhir Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris e. Tindak lanjut Klaim Asuransi

			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Tindak lanjut Klaim Kredit Bermasalah</li> <li>g. Tindak lanjut Kinerja Penyaluran Dana oleh Bagian Kredit khususnya untuk semester II tahun 2023.</li> <li>h. Tindak lanjut Perubahan Core Banking System</li> <li>i. Tindak lanjut PKS Channeling dengan PT Jtrust Indonesia, Tbk</li> <li>4. Pengawasan tindak lanjut temuan audit internal periode April 2023 s.d Juni 2023</li> <li>5. Pengawasan terhadap tindak lanjut surat dari OJK, terkait dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan Izin Usaha dengan nama baru</li> <li>b. Penerapan Program APU - PPT</li> </ul> </li> <li>6. Peringatan HUT BPR Baturaja</li> </ul>
4.	04 Oktober 2023	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1, Pengawasan terhadap pelaksanaan RBB tahun 2023</li> <li>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan internal BPR Baturaja</li> <li>3. Pembahasan pelaksanaan langkah strategis dan RBB Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Modal Dasar</li> <li>b. Pengelolaan payroll P3K Dinas Pendidikan</li> <li>c. Penyampaian dan RUPS Laporan Direksi triwulan III tahun 2023 sesuai Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Pasal 78</li> <li>d. Time schedule program dan langkah kerja disetiap struktur organisasi dalam rangka pelaksanaan RBB periode September 2023 s.d. Desember 2023 (triwulan IV tahun 2023)</li> <li>e. Tindak lanjut klaim asuransi</li> <li>f. Tindak lanjut kredit bermasalah</li> <li>g. Langkah strategis perbaikan kinerja kredit</li> <li>h. Langkah strategis penghimpunan Dana Pihak Ketiga terutama peningkatan komposisi penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan realisasi Loan to Deposit Ratio (LDR).</li> <li>i. Tindak lanjut perubahan core banking system dari CBN ke Tera Data (Aplikasi LOS dan laporan yang dibutuhkan)</li> <li>j. Tindak lanjut proses permintaan data Core Banking System dengan PT Telkom Indonesia</li> <li>k. Tindak lanjut surat pemeriksaan pajak tahun 2019 dan</li> </ul> </li> </ul>



			<p>tahun 2020</p> <p>5. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan internal</p> <p>6. Pengawasan terhadap tindak lanjut surat dari OJK, terkait dengan</p> <p>a. Penerapan PPPSPM</p> <p>b. Laporan DTTOT dan PPSPM</p>
5.	30 November 2023	1	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi RBB tahun 2023 PT BPR Baturaja (Perseroda) sampai dengan bulan November 2023</p> <p>2. Pembahasan Pelaksanaan Langkah dan Strategi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Triwulan IV</p> <p>a. Perda Perubahan Modal Dasar</p> <p>b. Tindak lanjut klaim asuransi</p> <p>c. Tindak lanjut kredit bermasalah</p> <p>d. Tindak lanjut perubahan core banking sistem dari CBN ke Tera Data (Aplikasi LOS dan laporan yang dibutuhkan)</p> <p>e. Tindak lanjut surat dari Telkomsigma nomor: 0908/Q/BFS/BTRJ/09/2022 tanggal 27 September 2023 perihal Tanggapan Permohonan Pengurangan Biaya atas Permintaan Database Core Banking System PT BPR Baturaja (Perseroda) Data History (GLHST) Tanggal 3 Feb 2018 s.d. 29 Feb 2020 dan Data Mutasi Rekening (H8PO) Tanggal 3 Feb 2018 s.d. 15 Jan 2021 dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 belum termasuk pajak dan biaya media storage 1 TB (flashdisk/Hard disk)</p> <p>3. Pengawasan terhadap pemenuhan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Risalah Rapat Nomor RR-17/KR.071110/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 dengan Agenda Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan PT BPR Baturaja. diantaranya terkait dengan:</p> <p>a. Kinerja Keuangan</p> <p>b. Manajemen</p> <p>c. Laporan, Pembukuan, Akuntansi dan Operasional</p> <p>d. Aktivitas Perkreditan</p> <p>e. Penerapan Program APU dan PPT</p> <p>4. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p>

			<p>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;</p> <p>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
6.	28 Desember 2023	1	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi RBB tahun 2023 PT BPR Baturaja (Perseroda) sampai dengan bulan Desember 2023</p> <p>2. Pembahasan Pelaksanaan Langkah dan Strategi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Triwulan IV</p> <p>a. Perda Perubahan Modal Dasar</p> <p>b. Tindak lanjut klaim asuransi</p> <p>c. Tindak lanjut kredit bermasalah</p> <p>d. Tindak lanjut perubahan core banking sistem dari CBN ke Tera Data (Aplikasi LOS dan laporan yang dibutuhkan)</p> <p>e. Tindak lanjut surat dari Telkomsigma nomor: 0908/Q/BFS/BTRJ/09/2022 tanggal 27 September 2023 perihal Tanggapan Permohonan Pengurangan Biaya atas Permintaan Database Core Banking System PT BPR Baturaja (Perseroda) Data History (GLHST) Tanggal 3 Feb 2018 s.d. 29 Feb 2020 dan Data Mutasi Rekening (H8PO) Tanggal 3 Feb 2018 s.d. 15 Jan 2021 dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 belum termasuk pajak dan biaya media storage 1 TB (flashdisk/Hard disk)</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut surat dari OJK periode triwulan IV tahun 2023 (bulan Desember 2023) sebagai berikut:</p> <p>a. Surat OJK Nomor: S-48/KO.171/2023 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Konsumen Periode Triwulan III Tahun 2023</p> <p>b. Surat OJK Nomor: S-54/KO.171/2023 tanggal 7 Desember 2023 Perihal Penyampaian Surat Himbauan dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Pendataan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) BPS 2023</p> <p>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun 2024</p> <p>5. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan</p>

			<p>manajemen risiko:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;</p> <p>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</p>			
<p>Pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR Baturaja dimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan Risalah Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik. untuk semester I dan semester II Tahun 2023 ini telah dilaksanakan 6 (enam) kali Rapat Anggota Dewan Komisaris.</p>			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Rahma Delawati	6	0	100%
2.	H. Achmad Tarmizi	2	0	50%
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>				
<p>Kehadiran Komisaris Utama dalam Rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 sudah 100% (seratus per seratus). sedangkan untuk Komisaris hanya 34% (tiga puluh empat per seratus) karena jabatan yang bersangkutan berakhir pada tanggal 19 Juli 2023</p>				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama Tahun 2023 tidak terjadi Penyimpangan baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama Tahun 2023 tidak pernah ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Baturaja baik akibat laporan atau oleh Pengaduan Nasabah maupun akibat laporan atau pengaduan dari internal		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
<p>Selama tahun 2023 tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan termasuk pemberian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Notaris Nomor 85 Tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn; dan</li> <li>2. Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> <li>3. Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> </ol> <p>Direksi telah melakukan pengkinian terhadap aturan yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 016/02/ BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.</p>							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2023	Sosial	Bantuan Uang Tunai dalam rangka kegiatan perlombaan	LEMKARI KABUPATEN OKU	Rp2.300.000
2.	09 Januari 2023	Sosial	Bantuan dalam bentuk	Pemerintah	Rp5.200.000

			barang	Kabupaten Ogan Ilir	
3.	12 Januari 2023	Sosial	Bantuan Benih Ikan Gabus	Dinas Perikanan Kabupaten OKU	Rp5.000.000
4.	13 Januari 2023	Sosial	Bantuan untuk operasional tim dalam kegiatan Liga Bola Voli Sumatera Selatan	PBVSI Kabupaten OKU	Rp1.000.000
5.	16 Januari 2023	Sosial	Biaya Kegiatan Gebyar Islami Anak	Kemenag OKU	Rp2.250.000
6.	17 Januari 2023	Sosial	Bantuan dalam bentuk peralatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp3.300.000
7.	17 Januari 2023	Sosial	Bantuan Uang Tunai	Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah	Rp7.720.000
8.	20 Januari 2023	Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Tournament Offline E-Sport Mobile Legend Karang Taruna	Karang Taruna Baturaja Timur	Rp1.000.000
9.	30 Januari 2023	Sosial	Bantuan Dana dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	Pemerintah Kabupaten OKU Timur	Rp13.000.000
10.	31 Januari 2023	Sosial	Bantuan Dana Uang Tunai	Porwosi Kabupaten OKU	Rp2.000.000
11.	14 Februari 2023	Sosial	Bantuan Dana dalam rangka Lomba Badminton	Polres OKU	Rp3.000.000
12.	14 Februari 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembuatan Film Pendek	Pengadilan Agama	Rp5.000.000
13.	17 Februari 2023	Sosial	Bantuan Dana dalam bentuk uang tunai	SD Islam Al-Azhar 70	Rp2.000.000
14.	23 Februari 2023	Sosial	Bantuan dana kegiatan gebyar	Pengurus Kormi Kabupaten OKU	Rp2.000.000

			global dan kormi sumsel		
15.	07 Maret 2023	Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Kejurda Pordi OKU Cup Tahun 2023	Pengurus Pordi OKU	Rp1.250.000
16.	20 Maret 2023	Sosial	Bantuan Dana Lomba Hadroh dan Burdah	OKU Ekspres	Rp2.000.000
17.	21 Maret 2023	Sosial	Bantuan Dana untuk Pembelian Dispenser Air Minum	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU	Rp1.000.000
18.	03 April 2023	Sosial	Bantuan dana untuk kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten OKU selama bulan Ramadan	Pengurus PKK Kabupaten OKU	Rp3.750.000
19.	04 April 2023	Sosial	Bantuan dana untuk kejuaraan Kempo antar Kabupaten se Indonesia	Pengurus Kempo Kabupaten OKU	Rp1.000.000
20.	06 April 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembelian Gorden dan Rempel Meja Kantor Dekranasda Kabupaten OKU	Dekranasda Kabupaten OKU	Rp10.000.000
21.	11 April 2023	Sosial	Bantuan Dana untuk Kegiatan Bhakti Sosial Duta Kesetiakawanan Kabupaten OKU	Duta Kesetiakawanan Sosial Kabupaten OKU	Rp1.000.000
22.	12 April 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembuatan Jersey Tjoeboer	Club Motor Tjoeboer	Rp1.500.000
23.	18 April 2023	Sosial	Bantuan untuk korban Banjir Lahat	Masyarakat Korban Banjir	Rp8.000.000
24.	18 April 2023	Sosial	Bantuan Dana untuk kegiatan Tabliq Akbar Ustad Abdul Somad di	Bagian Kesejahteraan Setda OKU	Rp20.000.000

			Baturaja		
25.	28 April 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan Safari Ramadan 1444H penyediaan Paket Tas + ATK, Snack dan Konsumsi	Pemerintah Kabupaten OKU	Rp20.204.000
26.	28 April 2023	Sosial	Pembelian Paket Sembako Pembukaan Pasar Bedug Ramadan 1444 H	Pemerintah Kabupaten OKU	Rp2.500.000
27.	04 Juli 2023	Sosial	Bantuan Seragam untuk majelis Taklim Ar-Ruhama Air Gading	Majelis Taklim Masjid Ar-Ruhama Air Gading	Rp1.500.000
28.	05 Juli 2023	Sosial	Bantuan Pembuatan Baju Seragam Batik KTNA Kabupaten OKU	KTNA Kabupaten OKU	Rp4.000.000
29.	15 Juli 2023	Sosial	Bantuan Biaya Operasional Tim Kesenian Kabupaten OKU	Dinas Pariwisata Kabupaten OKU	Rp2.000.000
30.	16 Juli 2023	Sosial	Bantuan Seragam untuk Tenaga Kontrak di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 75 Pcs	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU	Rp6.000.000
31.	12 Juni 2023	Sosial	Bantuan Dana dalam rangka kejuaraan nasional Perpani di Jakarta	Pengurus Perpani OKU	Rp1.575.000
32.	13 Juni 2023	Sosial	Dalam Rangka Porseniwada di Kota Lubuk Linggau	Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten OKU	Rp1.000.000
33.	14 Juni 2023	Sosial	Bantuan dana dalam rangka kegiatan Festival Danau Ranau	Dinas Pariwisata Kabupaten OKU Selatan	Rp3.250.000
34.	14 Juni 2023	Sosial	Bantuan Dana Kejuaraan Kempo	Perkemi Kabupaten OKU	Rp1.400.000



35.	19 Juni 2023	Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Olimpiade Sains Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan	Rp4.250.000
36.	21 Juni 2023	Sosial	Pembuatan Materi Promosi di Neon Box Hotel Grand Ansara Mentari Baturaja	Hotel Grand Ansara Mentari	Rp9.000.000
37.	03 Juli 2023	Sosial	Pemberian dalam bentuk dana Festival Sriwijaya	Panitia Festival Sriwijaya	Rp10.000.000
38.	18 Juli 2023	Sosial	Bantuan dana untuk kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan	Rp5.000.000
39.	31 Juli 2023	Sosial	Bantuan dana yang digunakan untuk pembelian souvenir atau cinderamata HUT OKU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp16.200.000
40.	03 Agustus 2023	Sosial	Bantuan dana untuk kegiatan Gran Fondo Tahun 2023	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan	Rp20.000.000
41.	07 Agustus 2023	Sosial	Pemberian dalam bentuk dana yang dialokasikan untuk pengadaan Bendera Merah Putih	Kantor Kesbangpol Kabupaten OKU	Rp3.500.000
42.	09 Agustus 2023	Sosial	Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	Rp2.400.000
43.	16 Agustus 2023	Sosial	Bantuan dana untuk Festival Rempah-Rempah OKU	PKK Kabupaten OKU	Rp5.000.000
44.	16 Agustus 2023	Sosial	Bantuan Dana untuk Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 78	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU	Rp2.000.000

45.	25 Agustus 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 78	PMI Kabupaten OKU	Rp4.250.000
46.	31 Agustus 2023	Sosial	Bantuan kegiatan KONI	KONI Kabupaten OKU	Rp6.000.000
47.	12 September 2023	Sosial	Bantuan dana Fasilitas & Akomodasi Lomba Kadarkum	Bagian Hukum Setda OKU	Rp3.200.000
48.	18 September 2023	Sosial	Bantuan dana Panen Hasil Karya Murid	SD Negeri 20 Martapura, OKUT	Rp2.600.000
49.	29 September 2023	Sosial	Bantuan Dana untuk kegiatan Gebyar Sekolah	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur	Rp3.000.000
50.	04 Oktober 2023	Sosial	Bantuan dana untuk Pemilihan Bujang Gadis Kampus	Universitas Baturaja	Rp4.000.000
51.	25 Oktober 2023	Sosial	Bantuan dana biaya Dies Natalis Himakom Unbara	Universitas Baturaja	Rp2.500.000
52.	08 November 2023	Sosial	Bantuan dana untuk pembuatan seragam	Ikatan Jurnalis Televisi	Rp2.000.000
53.	13 November 2023	Sosial	Bantuan Dana HUT PGRI	Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir	Rp20.900.000
54.	22 Desember 2023	Sosial	Pembelian PMT anak stunting	Dinas Kesehatan Kabupaten OKU	Rp3.000.000
55.	30 November 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan HUT PGRI Kabupaten OKU Selatan	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan	Rp21.750.000
56.	04 Desember 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan HUT PGRI Kabupaten OKU Timur	Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur	Rp25.500.000
57.	07 Desember 2023	Sosial	Bantuan dana kegiatan Fun Offroad dan Trabas	TNI AD-Puslatpur	Rp15.000.000
58.	12 Desember 2023	Sosial	Bantuan dana untuk pembuatan Seragam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Rp4.000.000

			Kerja	Menengah	
59.	31 Desember 2023	Sosial	Seluruh kegiatan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud data di atas yang telah dibantu oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) selama tahun 2023 dengan berbagai jenis kegiatan seperti ucapan duka cita, bantuan HUT RI, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan kegiatan olahraga, bantuan kegiatan pendidikan dan sebagainya dengan total keseluruhan sebesar Rp336.610.400 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).	Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta	Rp336.610.400
60.	24 Januari 2024	Sosial	Bantuan CSR untuk pengecetan Taman Makam Pahlawan Kabupaten OKU	Pengurus Makam Pahlawan	Rp600.000
61.	29 Januari 2024	Sosial	Bantuan CSR untuk Korban Kebakaran Kelurahan Kemalaraja	Masyarakat Korban Kebakaran melalui Dinas Sosial Kabupaten OKU	Rp2.075.000
62.	30 November 2023	Sosial	Bantuan CSR alat permainan anak-anak	Taman Kanak-Kanak Negeri 3 OKU	Rp6.800.000

63.	28 Desember 2023	Sosial	Bantuan CSR untuk Renovasi Masjid	Masjid Nurul Huda Lengkiti	Rp15.000.000
64.	29 Desember 2023	Sosial	Bantuan CSR untuk modal usaha	UMKM Mitra Binaan Tim PKK Kecamatan Baturaja Timur	Rp30.000.000

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Total dana Bantuan, Sumbangan, Sponsorship yang dikategorikan untuk kegiatan sosial dan berasal dari dana Biaya Pemasaran atau Biaya Promosi selama tahun 2023 yang telah digunakan sebesar Rp679,359,400,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dan selama tahun 2023 BPR Baturaja tidak pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

Sedangkan untuk Dana CSR, selama tahun 2023 telah tersalurkan sebesar Rp54.475.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.416.528,99 (lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah)

Sehingga total seluruh bantuan sosial yang disalurkan oleh BPR Baturaja sebesar Rp733.834.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Baturaja (Perseroda)
Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.0828 RT 034 RW 010 Kel.Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Nomor Telepon	: 0735 3740229
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp18.381.351.592
Total Aset	: Rp130.098.538.904

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Baturaja (Perseroda) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.28	0.256
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.38	0.207
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.66	0.166
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.63	0.163
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.06	0.106
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075

10	Rencana Bisnis BPR	1.17	0.088
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.20	0.090
Nilai Komposit			1.3
Predikat Komposit			Sangat Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.28)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus dilakukan peningkatan diantaranya:

1. Terkait pendokumentasian Risalah Rapat Direksi yang belum dilakukan dengan baik dan lengkap
2. Direksi meningkatkan peranannya dalam pengusulan kebijakan-kebijakan kepada Pemegang Saham khususnya Pemerintah Kabupaten OKU

Secara keseluruhan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sangat baik selama tahun 2023 dan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Internal, Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.38)

Selama tahun 2023 pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berjalan dengan baik hanya saja Komposisi Anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana terjadi kekosongan jabatan untuk posisi Komisaris sejak tanggal 19 Juli 2023.

Proses pemenuhan kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris dimaksud telah dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten OKU dan saat ini telah terpilih 1 (satu) Calon Komisaris yang sedang diajukan proses persetujuan di Otoritas Jasa Keuangan.

Namun BPR Baturaja terlambat untuk memenuhi kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 8 Januari 2024.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Baturaja belum wajib untuk membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi karena memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan ataupun mengandung benturan kepentingan.

BPR Baturaja telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait mekanisme penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan terutama untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu penanganan Benturan Kepentingan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi juga tercantum dalam SK Direksi Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Tata Tertib Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan perubahan terakhirnya dalam SK Direksi Nomor 016/02/ BPR.BTA/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

#### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.66)

Penerapan fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan cukup baik dimana Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap fungsi penyaluran dana. BPR Baturaja telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi kepatuhan yang tidak merangkap pada fungsi audit atau fungsi operasional.

Penerapan fungsi Kepatuhan sudah berjalan dengan cukup baik meskipun terdapat beberapa kelemahan diantaranya terkait dengan pemenuhan laporan, pemenuhan kebijakan atau prosedur yang menimbulkan sanksi atau denda.

#### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)

Penerapan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik dimana. BPR Baturaja telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi Audit intern yang tidak merangkap di fungsi kepatuhan atau fungsi operasional.

Penerapan fungsi Audit Intern sudah berjalan berkesinambungan hanya saja belum dilakukan secara optimal

#### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah berjalan baik, Penggunaan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk pemenuhan terhadap laporan penunjukan dan laporan evaluasi.

#### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.06)

Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik namun perlu perbaikan di beberapa sisi terutama untuk penerapan Manajemen Risiko di bidang kepatuhan dan likuiditas. Sistem Pengendalian Intern telah dipahami dengan cukup baik oleh Pegawai.

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)



BPR Baturaja telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2023 tidak ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.17)

Rencana Bisnis BPR Baturaja telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Penyusunan Rencana Bisnis Bank BPR dengan realistis dan optimis. RBB disusun oleh Direksi, ditelaah dan disetujui Dewan Komisaris serta disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.2)

Selama tahun 2023 BPR Baturaja telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan baik. Pemenuhan laporan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti Laporan Tahunan dan Laporan Penerapan Tata Kelola.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

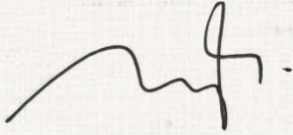
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Secara umum penerapan Tata Kelola pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, Penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit, fungsi manajemen risiko dan pelaksanaan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana hal tersebut tergambar dengan tidak adanya fraud dan transaksi benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2023.
2. Penerapan Tata Kelola tetap ada catatan yang perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, komposisi Dewan Komisaris, dan terkait pemenuhan kewajiban terhadap pelaporan, pengkinian kebijakan dan prosedur.

Baturaja, 17 Januari 2024

PT BPR Baturaja (Perseroda)

Disusun Oleh



Hendra Gunawan

Chief of MKA



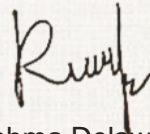
Disetujui Oleh



Januar Hertanto

Direktur Utama

Disetujui Oleh



Rahma Delawati

Komisaris Utama